

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

L  
A  
K  
I  
P



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 yang merupakan Laporan Capaian Kinerja tahun ke III (tahun ketiga) Rencana Strategis 2016-2021.

Kami telah berusaha dengan maksimal menyusun Laporan Kinerja ini dan masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi. Baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerja dan tata cara penyusunannya, Untuk itu kami dengan senang hati menerima masukan baik dari penilai maupun dari para pembaca.

Pada kesempatan ini tak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya Laporan Kinerja tahun 2018 ini.

Kuala Tungkal, Januari 2019

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

  
**Drs. ENCEP JARKASIH**

Pembina Tk. I

NIP.19701201 199009 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI ` .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Sumber Daya Organisasi.....	6
1.7 Sistematika Penyajian .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2018 .....	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	36
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja .....	56
3.3 Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi.....	62
3.4 Analisis Capaian Kinerja Mengacu Pada Program RPJMD.....	68
3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	71
3.6 Realisasi Anggaran .....	71
3.7 Analisis Program/ Kegiatan.....	73
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan .....	83
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja .....	83

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

---

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian daerah berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang efektif dan efisien, agar mampu mendorong peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kualitas pelayanan public sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021.

Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menjawab, menerangkan kinerja serta tindakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Indikator Kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan indikator kinerja *Output* dan atau *Outcome* dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (*Input*), keluaran (*Output*), dan hasil (*Outcome*) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### I.2 Dasar Hukum

---

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 disusun berpedoman pada:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58;
- e. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- p. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23).
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- y. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- z. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

### I.3 Maksud dan Tujuan

---

Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban dan komitmen sesuatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang berisikan tentang informasi keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan perjanjian kinerja. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018.
- b. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pada periode yang akan datang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.
- d. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### I.4 Tugas Pokok dan Fungsi

---

Secara umum aparatur dapat diartikan sebagai alat “Negara” namun ada juga yang beranggapan bahwa aparatur diartikan sebagai “pegawai negeri” yang mengandung pengertian sebagaimana tertuang dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pada Pasal I huruf a berbunyi : “Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas Negara Lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi Kepegawaian dalam hal ini mengacu pada kepegawaian sebagai suatu system penyelenggaraan manajemen ASN, termasuk didalamnya Aparatur Sipil Negara sebagai Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada (Existing system). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **I.5 Susunan Organisasi**

---

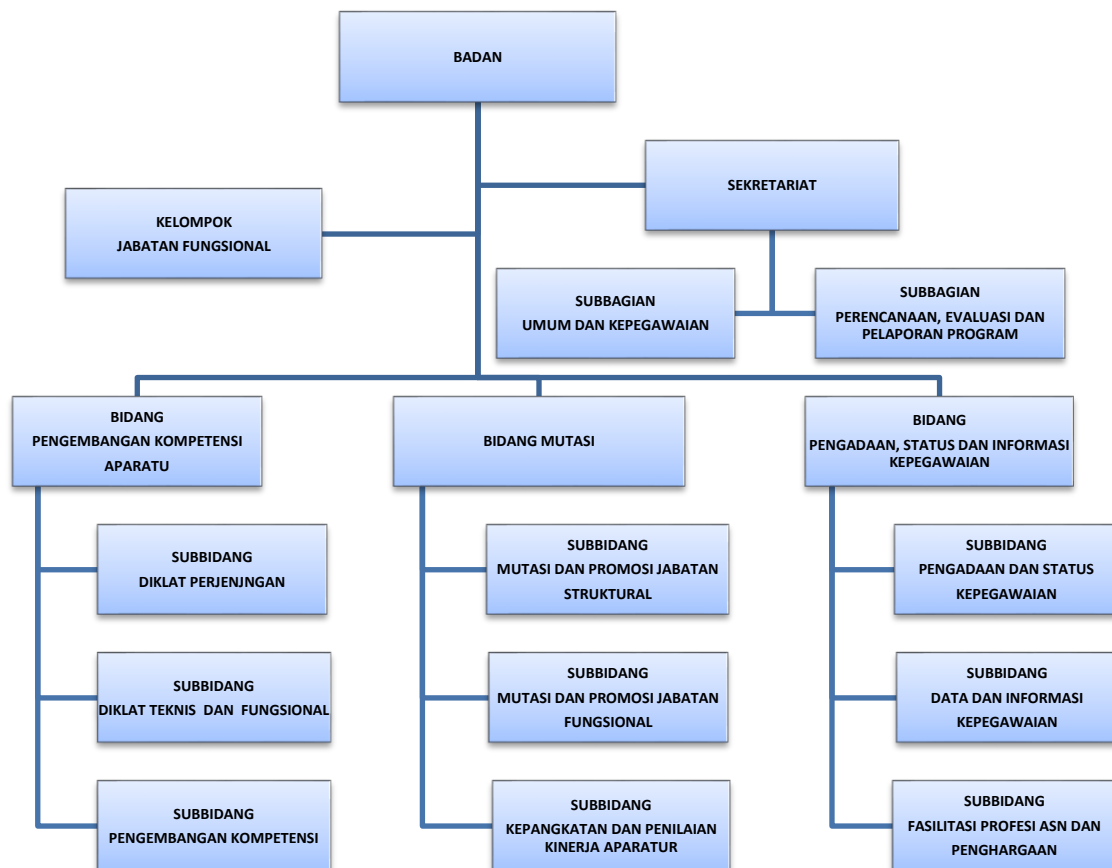
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- b. Sekretariat membawahi :
  - 1) Sub. Bagian Umum dan Keuangan
  - 2) Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
  - 1) Sub. Bidang Diklat Perjenjangan
  - 2) Sub. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
  - 3) Sub. Bidang Pengembangan Kompetensi



- d. Bidang Mutasi
  - 1) Sub. Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural
  - 2) Sub. Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan Fungsional
  - 3) Sub. Bidang Kepangkatan dan Penilaian Kinerja Aparatur
- e. Bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian
  - 1) Sub. Bidang Pengadaan dan Status Kepegawaian
  - 2) Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian
  - 3) Sub. Bidang Fasilitasi Propesi ASN dan Penghargaan

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 lebih jelas sebagaimana berikut ini:



## I.6 Sumber Daya Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejumlah 69 Orang terdiri dari.

**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1.</b>	<b>Jumlah pegawai berdasarkan Eselon :</b>			
-	Eselon II	1	1	-
-	Eselon III	4	3	1
-	Eselon IV	11	6	5
<b>2.</b>	<b>Jumlah pegawai berdasarkan jumlah pendidikan :</b>			
-	S.3	-	-	-
-	S.2	-	-	-
-	S.1	29	21	8
-	D. IV	-	-	-
-	D. III	1	-	1
-	SLTA	12	8	4
<b>3.</b>	<b>Jumlah pegawai berdasarkan status :</b>			
-	PNS	42	31	11
-	Non PNS	27	14	13
<b>4.</b>	<b>Jumlah pegawai mengikuti Diklat Perjenjangan :</b>			
-	Pim II	-	-	-
-	Pim III	2	1	1
-	Pim IV	2	1	1

Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat selesai tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

Adapun fasilitasi yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercatat sampai dengan desember tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	NILAI (Rp)
1	2	3
1.	Tanah	1.503.675.000
2.	Peralatan dan Mesin	
	➤ Alat-alat Angkutan	930.310.000
	➤ Alat Bengkel dan Alat Ukur	35.030.000
	➤ Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.654.003.150
	➤ Alat Studio dan Alat Komunikasi	406.690.250
	➤ Alat Laboratorium	40.000.000
3.	Gedung dan Bangunan	
	➤ Bangunan Gedung	7.859.014.855
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	➤ Bangunan Air/ Irigasi	82.528.184
	➤ Instalasi	131.636.000
	<b>TOTAL</b>	<b>13.602.927.439</b>

## I.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

### BAB I

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### BAB II

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ Ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### BAB III

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis Capaian Kinerja mengacu pada target RPJMD
5. Analisis atas efisien penggunaan sumber daya;
6. Realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### BAB IV

Penutup

LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tahapan Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Jabung Barat dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai pembaharuan, penataan dan perbaikan terhadap system kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **2.1. Rencana Strategis dan Target Tahun 2018**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban bupati terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indicator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tupoksi sebagai perangkat daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitannya dengan Misi-4 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni

**Misi-4**

***“Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Harmonisasi Kehidupan Bearagama dan Berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintah yang baik”.***

Visi adalah arah pandang kedepan tentang tujuan yang akan dicapai organisasi. Untuk mendukung capaian Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menetapkan visinya harus mengacu pada visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 yaitu :

**Visi**

***“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”***

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 adalah :

**Visi :**

***“ Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkompetensi dan Profesional”***

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi mengacu pada tugas dan wewenang yang diberikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Untuk mewujudkan Visi tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 4 (empat) **Misi** sebagai berikut:

Kode	Misi (M)
MI	<i>Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur</i>
M2	<i>Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik</i>
M3	<i>Meningkatkan pembinaan disiplin dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur</i>
M4	<i>Meningkatkan pengembangan sumber daya aparatur dan mengelola sistem informasi kepegawaian</i>

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka I (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah untuk jangka waktu jangka pendek (satu tahun) dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Kode	Tujuan (T)
T.1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.
T.2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif.

Kode	Sasaran (S)
S.1	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi.
S.2	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur dan sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat.
S.3	Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota KORPRI.

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-N					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kualitas	Peningkatan SDM Aparatur yang	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti	0	0	27,9%	40%	44%	48%

	dan Profesionalisme Aparatur	berkualitas dan Berkompetensi	Diklat Struktural							
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12,4%	13,7%	15%	17%	19,2%	24,5%	
2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan administrasi, Kinerja Aparatur dan sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	73%	76%	79%	82%	85%	85%	
			Persentase data ASN yang di Mutahirkan	90%	90%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	0	90%	90%	90%	90%	
			Persentase kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota Korpri	Persentase Bantuan Hukum yang di Fasilitasi	100%	100%	0	100%	100%	100%	
			Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



## 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

---

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen yang berisikan penyusunan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan pernyataan perjanjian kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 terdiri dari 2 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ENCEP JARKASIH  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS  
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2018

Pihak Kedua,  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Tk. I

NIP. 19701201 199009 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompentensi	- Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural - Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	27,9% 15%
2.	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan administrasi, Kinerja Aparatur dan sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat	- Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi - Persentase data ASN yang di Mutahirkan - Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian - Persentase kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan	79% 100%
			90%
			90%

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1. Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp. 982.513.000</b>	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.332.000	APBD
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 78.400.000	APBD
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 91.580.000	APBD
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 36.523.850	APBD
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 80.081.150	APBD
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 40.360.000	APBD
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.851.000	APBD

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 6.000.000	APBD
- Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 4.200.000	APBD
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp. 904.435.000	APBD
<b>2. Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur</b>	<b>Rp. 428.680.200</b>	
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 168.830.200	APBD
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp. 78.700.000	APBD
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 141.000.000	APBD
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 22.750.000	APBD
<b>3. Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Rp. 28.700.000</b>	
- Pengadaan Kendaraan Dinas beserta Perlengkapannya	Rp. 28.700.000	APBD
<b>4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp. 142.620.750</b>	
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 83.770.750	APBD
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 58.850.000	APBD
<b>5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp. 376.962.850</b>	
- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	Rp. 172.272.000	APBD
- Diklat Prajabatan Golongan II dan III	Rp. 204.690.850	APBD
<b>6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Rp. 1.264.453.250</b>	
- Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 158.812.000	APBD
- Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/	Rp. 61.750.000	APBD

KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN		
- Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 213.258.250	APBD
- Pengangkatan CPNS menjadi PNSD dan Sumpah PNSD	Rp. 48.725.000	APBD
- Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 71.000.000	APBD
- Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 284.666.250	APBD
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 58.810.000	APBD
- Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Rp. 139.560.000	APBD
- Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Rp. 168.286.750	APBD
- Penilaian Kinerja Aparatur	Rp. 171.085.000	APBD
<b>7. Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI</b>	<b>Rp. 61.900.000</b>	
- Peringatan HUT KORPS Pegawai Pegawai Republik Indonesia	Rp. 61.900.000	APBD

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2018

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
SS1	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural = 27,9%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural}}{\text{Jumlah Total Jabatan}} \times 100$	Rekapitulasi Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural	BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = 15%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100$	Rekapitulasi Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	BKPSDM
SS2	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur dan sistem Pengelolaan	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi = 79%	$\frac{\text{Jumlah Pejabat, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum yang telah mengikuti uji kompetensi}}{\text{Jumlah Jabatan, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum}} \times 100$	Rekapitulasi Pejabat, Fungsional Umum dan Fungsional tertentu	BKPSDM
		Persentase data ASN yang di Mutahirkan = 100%	$\frac{\text{Jumlah Data Kepegawaian yang di Mutahirkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak penetapan}}{\text{Jumlah Data Kepegawaian}} \times 100$	DUK PNS Kab. Tanjung Barat	BKPSDM

Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat		Jumlah Seluruh Data Pegawai		
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian = 90%	$\frac{\text{Jumlah Berkas Pensiun+Berkas Kenaikan Pangkat+Berkas Karis/Karsu/Karpeg+Berkas Cuti+Berkas Setyalencana+Berkas Izin Cerai+Tugas Belajar dan Izin Belajar+Berkas Mutasi yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Berkas Pensiun+Berkas Kenaikan Pangkat+Berkas Karis/Karsu/ Karpeg+Berkas Cuti+Berkas Setyalencana+Berkas Izin Cerai+Tugas Belajar dan Izin Belajar+Berkas Mutasi yang diusulkan}} \times 100$	Rekapitulasi Jumlah Administrasi Pegawai	BKPSDM
	Persentase kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan = 90%	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan}}{\text{Jumlah aparatur yang terkait pelanggaran Disiplin}} \times 100$	Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Disiplin Pegawai	BKPSDM

**REVISI CASCADING BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

<b>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</b>							
<b>Visi "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"</b>							
<b>Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.</b>							
<b>Tujuan 2. Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif.</b>							
<b>Indikator Kinerja Utama</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural</li> <li>- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</li> <li>- Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi</li> <li>- Persentase data ASN yang dimutakhirkan</li> <li>- Persentase pelayanan administrasi kepegawaian</li> <li>- Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN yang terselesaikan</li> </ul>			
<b>Kepala Bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian</b>		<b>Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur</b>		<b>Kepala Bidang Mutasi</b>		<b>Sekretariat</b>	
<i>1</i>		<i>2</i>		<i>3</i>		<i>4</i>	
Sasaran 1	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur serta Sistem Pengelolaan Data dan	Sasaran 1	Peningkatan SDM aparatur yang berkualitas dan berkompentensi	Sasaran 1	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur serta Sistem Pengelolaan Data dan	Sasaran 1	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administr



	Informasi Kepegawaian yang Akurat						Informasi Kepegawaian yang Akurat			asi, Kinerja Aparatur serta Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat
Sasaran 2	Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota Korpri									
<b>Kasi Pengadaan &amp; Status Kepegawaian</b>	<b>Kasi Data dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>Kasi Fasilitasi Profesi ASN &amp; Penghargaan</b>	<b>Kasi Diklat Teknis dan Fungsional</b>	<b>Kasi Pengembangan Kompetensi</b>	<b>Kasi Diklat Perjenjangan</b>	<b>Kasi Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural</b>	<b>Kasi Kepangkatan dan Penilaian Kinerja Aparatur</b>	<b>Kasi Mutasi dan Promosi Jabatan Fungsional</b>	<b>Kasubbag Umum dan Keuangan</b>	<b>Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>
<i>Output:</i>	<i>Output:</i>	<i>Output:</i>	<i>Output:</i>	<i>Output:</i>	<i>Output:</i>	<i>Output:</i>	<i>Output:</i>	<i>Output:</i>	<i>Output:</i>	<i>Output:</i>

Terlaksananya Pembinaan Disiplin, Pelayanan Konseling, Perkawinan serta Pensiun PNS	Terciptanya Buku Bezeeting/ Formasi PNS, Buku Profile PNS, Buku DUK PNS, Buku Struktur OPD Kab. Tanjab Barat TA. 2018	Terlaksanannya Sosialisasi dan Penyusunan LHKPN Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Terseleksinya a Penerimaan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS, Calon Taruna Sekolah Tinggi Perikanan dan Pembekalan Pola Pendidikan Calon Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat PIM II dan PIM III	Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka	Jumlah PNS yang mengajukan kenaikan pangkat periode April dan Oktober serta Pelantikan Pejabat dan Mutasi Pegawai	Jumlah PNS yang mengusulkan, Pengangkatan, Kenaikan Jabatan, Inpassing, Pembebasan, Pemberhentian dan Uji Kompetensi bagi PNS dalam Jabatan Fungsional	- Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Jumlah CPNSD yang diangkat dan diambil Sumpah menjadi PNSD	Terciptanya Optimalisasi Pelayanan Kepegawaian melalui SAPK On-Line, Bimtek Pengelolaan Data PNS,	Terselenggaranya Kegiatan HUT KORPRI dan Meningkatnya Kesejahteraan Anggota KORPRI Kab. Tanjab Barat			Jumlah Peserta Prajabatan CPNS Golongan II dan III				- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan yang tersedia	- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhi nya Formasi CPNS yang dibutuhkan	penyusunan kebutuhan formasi PNS serta Optimalisasi Penyelenggara aan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REVISI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
		1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10											
Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur dan sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	25 %	25 %	25 %	25 %	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Meningkatkan persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP B				Bidang Sekretariat												
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 Bulan	- Penyusunan bahan perencanaan dan laporan	83,770,750													

akurat								kinerja BKPSDM														
						Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12 Bulan	- Penyusunan bahan laporan keuangan BKPSDM	58,850,000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peningkatan SDM aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural	50 %	50 %		<input type="checkbox"/>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	- Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural  - Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				Bidang Diklat dan Pengembangan Karir											

						Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10 Orang	- Pengiriman peserta diklat PIM dan Fungsional	172,272,000					✓	✓	✓								
	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal					Diklat Prajabatan Golongan II dan III	Meningkatnya SDM Aparatur CPNS	93 Orang	- Pelaksanaan pelatihan diklat CPNS	204,690,850		✓	✓	✓											
Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan administrasi,	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompet	20 %	30 %	30 %	20 %	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	- Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi				Bidang Diklat dan Pengembangan Karir, Bidang Mutasi dan Bidang Pengadaan														

Kinerja Aparatur dan sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat	ensi					- Persentase kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan - Persentase Data ASN yang dimutahirkan - Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian					, Status dan Informasi Kepegawaian												
						Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Diangkatnya pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	4 Orang	- Pelaksanaan tes seleksi jabatan eselon II	139,560,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
						Penilaian Kinerja Aparatur	- Jumlah PNS yang naik pangkat	600 Orang	- Sosialisasi serta pelantika	171,085,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

					- Terlaksananya pelantikan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	100 Orang	n dalam jabatan struktural																	
					- Terlaksananya Mutasi PNS	50 Orang																		
				Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Terlaksananya pengangkatan, kenaikan jabatan, Inpassing, pembebasan dan pemberhentian dan Uji Kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional	261 Orang	Pelaksanaan inpassing jabatan fungsional	168,286,750						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pengangkatan CPNS menjadi	Terpenuhinya formasi	169 Org 250	Pelaksanaan pengang	48,725,000						☐	✓	✓	✓	☐					☐	✓



				PNS dan Sumpah PNS	PNSD dan Pengambilan Sumpah serta pengangkatan CPNS menjadi PNSD Kab. Tanjab Barat	Org	katan CPNS menjadi PNS dan Sumpah CPNS																
				Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	25 Orang	Pemberian izin belajar dan tugas belajar serta pembekalan seleksi STTD	158,812,000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pengadaan CPNS	Terpenuhinya Formasi CPNS yang dibutuhkan	250 Orang	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2018	232,150,000		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	✓	✓	✓

	Persentase kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan				Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatkan pengetahuan Aparatur Peraturan Perundang-Undangan kedisiplinan PNS	112 Org PNS dan 44 OPD	Penindakan indisipliner PNS dan Tes Narkoba	213,258,250		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persentase Data ASN yang dimutakhirkan				Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Kab. Tanjung Barat	Tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	304 Orang	Sosialisasi dan entry data LHKPN	58,810,000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	
					Penyusunan data dan informasi kepegawaian kabupaten tanjung jabung barat	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang mutakhir	50 Buku	Pengumpulan dan pengolahan data DUK, Bazeting, struktur Organisasi serta Profil PNS	71,000,000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

						Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan SAPK (Perka BKN No. 18 tahun 2010)	12 Bulan	Manajemen Pelayanan SAPKN dan Pelaksanaan Bimtek pengolahan data PNS	284,666,250		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian					Fasilitas pengelolaan pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN	Terbitnya KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KP-E/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji	1050 Org	Mengumpulkan bahan dan pemberian izin PNS	61,750,000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan	Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPRI			25 %	75 %	<b>Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI</b>	Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPRI				Bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian													
						Peringatan HUT KORPS Republik	Terlaksananya kegiatan HUT bagi	100%	Pemberian penghargaan	61,900,000														

gan Hukum Anggota Korpri						Indonesia	PNS/ Anggota KORPRI		kepada anak anggota KORPRI berprest asi									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## PAGU ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2018

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>3,881,330,050</b>
	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>1,834,363,950</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,251,763,000</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,332,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78,400,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91,580,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36,523,850
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80,081,150
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,360,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,851,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	4,200,000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	904,435,000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>411,280,200</b>
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	168,830,200
12	Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor	78,700,000
13	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	141,000,000
14	Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	22,750,000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>28,700,000</b>
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	28,700,000
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>142,620,750</b>
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83,770,750
19	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	58,850,000
	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>2,046,966,100</b>
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>376,962,850</b>
16	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	172,272,000
17	Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III	204,690,850

<b>6</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>1,608,103,250</b>
20	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	139,560,000
21	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN	61,750,000
22	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat	213,258,250
23	Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNS	48,725,000
24	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat	71,000,000
25	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	284,666,250
26	Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kab. Tanjab Barat	158,812,000
27	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	168,286,750
28	Penilaian Kinerja Aparatur	171,085,000
29	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	58,810,000
30	Pengadaan CPNS	232,150,000
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI</b>	<b>61,900,000</b>
31	Peringatan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia	61,900,000

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerjanya melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tahun 2016-2021 maupun Renja tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

### **3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

---

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pengukuran kinerja, indikator yang digunakan adalah Indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2016. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, target dan realisasinya. Dari perbandingan antara target dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Berikut ini disampaikan tingkat capaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018.

Tabel 3.1

## Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kab. Tanjab Barat Tahun 2018

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>A.</b>	<b>Sasaran I : Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi</b>				
1.	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural	%	27,9	27,9	100
2.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	15	15,9	106
<b>B.</b>	<b>Sasaran II : Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur dan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat</b>				
3.	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	%	79	77,7	98
4.	Persentase Data ASN yang di Mutakhirkan	%	100	100	100
5.	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	90	90	100
6.	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan	%	90	90	100

Tabel 3.2

## Capaian Indikator Kinerja Lainnya(Pendukung) BKPSDM Kab. Tanjab Barat Tahun 2018

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>A.</b>	<b>Sasaran III : Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota KORPRI</b>				
1.	Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPRI	%	100	100	100

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif, penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:



Tujuan I : Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur

**SASARAN  
STRATEGIS I**

**Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur yang  
Berkualitas dan Berkompetensi**

Secara umum pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber daya manusia secara *makro* dan *mikro*. Pengertian sumber daya manusia secara *makro* adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara, sedangkan pengertian sumber daya manusia *mikro* lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi. Sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (*capability*) atau keahlian (*expertise*) yang lebih dari sekedar keterampilan (*skill*) belaka. Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan dan diklat. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Capaian IKU pada sasaran strategis I**

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>A. Sasaran I : Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi</b>					
1.	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural	%	27,9	27,9	100
2.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	15	15,9	106

Uraian mengenai IKU tersebut yaitu pada tahun 2018 Pejabat Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Formal adalah :

### I. Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural

Diklat Struktural adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sekaligus untuk memberikan pengetahuan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan mengenai bidang tugas serta budaya organisasi. Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat PIM II, III, IV serta diklat prajabatan Gol II, III sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Analisis Capaian IKU**

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2017	Realisasi Capaian s/d Tahun 2018		Jumlah
			Target	Realisasi	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	- Diklatpim II	9 Orang	2 Orang	-	9 Orang
.	- Diklatpim III	101 Orang	3 Orang	3 Orang	104 Orang
	- Diklatpim IV	169 Orang	-	-	169 Orang
	- Diklat Prajabatan Golongan II dan III	742 Orang	93 Orang	92 Orang	834 Orang
<b>TOTAL</b>					<b>1116 Orang</b>
<b>Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural (%)</b>					<b>27,9</b>

Sampai dengan tahun 2018 total apartur yang mengikuti diklat struktural adalah 1116 orang atau bertambah 95 orang dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pegawai Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai unsur pembagi sebanyak 3996 orang, sehingga persentase aparatur yang mengikuti diklat struktural ditargetkan sebesar 27,9% dan realisasinya pada tahun 2018 sebesar 27,9, akan tetapi masih terdapat target output yang belum dapat terealisasi pada tahun 2018 sebanyak 2 orang untuk diklat pim II sedangkan diklat pim III dapat direalisasikan sebanyak 3 orang seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5  
Daftar ASN yang mengikuti Diklat PIM III

N o.	Nama	Jenis Kelamin	NIP BARU	Pangkat/ Gol	Jabatan	ESE LO N	Pendidikan Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JOHAN HENDRY,S.STP	L	19800918 199810 1 001	IV.A	Administrator Camat Tkl Ulu	III.a	Diklatpim III 2018
2	HENDRY FONDA,S.STP, MH	L	19821015 200112 1 001	IV.A	Administrator Camat Bram Itam	III.a	Diklatpim III 2018
3	IYAL HARIANTO,S.IP	L	19861102 200701 1 001	III.d	Administrator Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM	III.b	Diklatpim III 2018

## 2. Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti dan lulus kompetensi Diklat Formal

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Indikator ini merupakan jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Fungsional, dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6  
Analisis Capaian IKU

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2017	Realisasi Capaian s/d Tahun 2018		Jumlah
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
I.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	550 Orang	5 Orang	86 Orang	636 Orang
<b>TOTAL</b>					<b>636 Orang</b>
<b>Persentase ASN yang mengikuti Diklat Formal (%)</b>					<b>15,9</b>

Sampai dengan tahun 2018 total apartur yang mengikuti diklat formal sebanyak 1116 orang atau bertambah 86 orang dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pegawai Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai unsur pembagi sebanyak 3996 orang, sehingga persentase aparatur yang mengikuti diklat formal ditargetkan sebesar 15% dan realisasinya pada tahun 2018 sebesar 15,9 seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7  
ASN mengikuti Diklat Fungsional

No	OPD / SKPD	NAMA / NIP	JABATAN	DIKLAT YANG DIIKUTI
1	2	3	4	5
1	BAGIAN HUKUM SETDA	1 PISKA HARYANI, SH 19900413 201502 2 002	Calon Auditor Kepegawaian	Diklat Fungsional Auditor Kepegawaian
2	RSUD KH. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL	2 SUGENG RIYANTO 19740115 200804 1 001	Staf sanitasi dan lingk	Diklat penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup(DLH)dan dokumen pengolahan lingkungan hidup(DPLH) di Yokyakarta
		3 WIKE ARLUS PUSPTA, A,md.PK 19800117 200804 2 001	Kasi Diklat Dan Rekam Medis	Pelatihan Coding Ina CBG,s dan Pemberkasan BPJS dengan benar di Aula Lt 5 RS BAITURAHIM Jambi
		4 SUHAILI 19720105 199302 1 002	Staf perencanaan	Pelatihan Coding Ina CBG,s dan Pemberkasan BPJS dengan benar di Aula Lt 5 RS BAITURAHIM Jambi
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	5 ERVA ELISANTY 19820325 200701 2 005	Pengelola Kepegawaian	Diklat Teknis Inti Pengembangan Pariwisata Daerah
4	BADAN PENGELOLAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	6 YON HERI, SP, ME 19690801 199703 1 007	Kepala BPPRD	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
		7 H. DAHLAN, S.Sos, MM 19670108 199102 1 001	Sekretaris BPPRD	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
		8 H. YUDELMI, SE. MH 19630523 198903 1 014	Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
		9 A. KADIR. SE 19690803 199803 1 003	Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
		10 H. AHMAD, SE 19680713 199002 1 001	Kepala Bidang Penerimaan Asli Daerah	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
		11 SUGIANTO, SE 19670317 199002 1 001	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
		12 TABRONI 19641231 198910 1 035	Kasubbid. Evaluasi dan Pengendalian Pendap[atan	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
13 EKA FATMAWATI, S.IP, MA 19840410 201001 2 023	Kesubbid Pengkajian dan Pengembangan Potensi	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah		

14	OKAN IDIAS ALI, SH 19851231 201101 1 006	Kepala Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
15	H. HANAFAI, SE 19710415 199602 1 001	Kasubbid. Penagihan dan Keberatan PBB- P2 dan BPHTB	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
16	JUNAIDI, SH 19660317 200801 1 002	Kasubbid. Pendataan dan Pengukuran PBB- P2 dan BPHTB	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
17	M. JUNAIDI, SE 19760101 199903 1 004	Kasubbid. Pembukuan dan Verifikasi	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
18	M. HENDRA, SE 19820202 201101 1 007	Kasubbid. Dana Transper	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
19	TAUFIQ, S.IP 19730106 199403 1 002	Kasubbid. Penagihan dan Keberatan PAD	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
20	HERRI YANSA WIJAYA, S.Kom 19800702 201101 1 005	Kasubbid. Pendaftaran dan Pendapatan PAD	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
21	MIRA ANDRIANI, S.TP 19810319 200904 2 001	Kasubbid. Penilaian dan Penetapan	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
22	RAHMAWATI, S.Pt 19831030 201101 2 004	Kasubbag. Pengawas, Perhitungan, Verifikasi dan Pendapatan	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
23	FERRI MARTADINATA 19740329 200604 1 005	Pelaksana Pengelola Data Bahan Penilaian	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
24	M. YAMIN 19750827 200212 1 004	Pelaksana Penagih Pajak	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
25	HOLIDI 19701001 200801 1 002	Pelaksana Pengumpul Data Bahan Penilaian	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
26	KARIM 19620620 198303 1 004	Pelaksana Penagih Pajak	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
27	M. ARSYAD 19611103 199303 1 001	Pelaksana Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
28	DESYANI 19811211 200604 2 023	Pelaksana Pengumpul Data Wajib Pajak	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
29	M. DONG 19800518 200801 1 002	Pelaksana Penagih Pajak	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
30	RICI JULIANTI, SP 19840818 201101 2 005	Pelaksana Pengumpul Data	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
31	M. AKBAR 19781208 200604 1 013	Pelaksana Juru Pungut Retribusi	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
32	SITI KAMISAH 19810807 200701 2 019	Pelaksana Penagih Pajak	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah

		33	ABDUL RAHMAN 19800919 200701 I 013	Pelaksana Pengumpul Data Wajib Pajak	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah
		34	ENI RUSLINA, SE 19840604 200604 2 012	Pelaksana Analis Pengelola Dana Alokasi Umum	Diklat Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan (WTP) SERTA Pengelolaan Kas SKPD
		35	MELLY, S.AP 19800520 200701 2 018	Pelaksana Bendaharawan Pengeluaran	Diklat Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan (WTP) SERTA Pengelolaan Kas SKPD
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36	PONDI SAYUTI,SE 19631015 199001 I 001	Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK- SKPD)	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Tata Kelola Barang Persediaan SKPD
		37	M.QOBUL AKBAR 19801129 200801 I 002	Pejabat Pengurus Barang	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Tata Kelola Barang Persediaan SKPD
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	38	M. A M I N 19750619 200801 I 003	Pengadministrasi Pelatihan	Diklat Manajemen Of Training ( MOT )
		39	HERVINA MARTINOPA, S.STP 19860312 200412 2 002	Kasubbid. Diklat Penjenjangan	Diklat Perumusan Standar Kompetensi
		40	ICE IRAWAN, S. Kom 19860923 201502 I 001	Pelaksana Calon Pranata Komputer	Diklat Perumusan Standar Kompetensi
		41	Drs. H. NASRUL EFENDI 19700107 1989081 001	Pelaksana Pengadministrasian Umum BKPSDM	Diklat Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Bagi WI dan ASN
		42	RINNA MAYASARI, SE 19850510 201001 2 026	Pelaksana Pengadministrasi Keuangan BKPSDM	Diklat Teknis Inti Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota Se Prov Jambi
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( BPKAD )	43	MUNARTI, SE 19760303 200501 2 007	Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan	Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI Angkatan II
		44	TETTY SUSENO , A.Md 19830617 200904 2 003	Pelaksana Penyusunan Bahan Laporan Keuangan BPKAD	Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI Angkatan II
		45	TEGUH, S.Sos 19690408 199002 I 002	Kasubbid Penatausahaan Keuangan Bid. Akuntansi BPKAD	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
		46	HADRAWI 19820616 200501 I 006	Pelaksana Pengadministrasi Pengeluaran ( Bend. Pengeluaran BPKAD )	Diklat/Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai
		47	FADHIL HANAFI 19830110 201001 I 006	Pelaksana Pemegang Buku Kas ( Bend. Penerimaan BPKAD )	Diklat/Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai

		48	DONI HENDRA, A.Md 19861023 201001 1 011	Pelaksana Bidang Akuntansi BPKAD	Diklat Teknis Inti Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota Se Prov Jambi
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	49	SALDI. SH 19730306 200501 1 010	Kasi Kelembagaan	Diklat Teknis Inti Pembinaan / Pengawas Koperasidan UKM
		50	GUSTON TAMPUBOLON, A.Md 19830830 201001 1 010	Pelaksana Pengadministrasian Umum	Diklat Teknis Inti Prosedur Ekspor
		51	SALDI. SH 19730306 200501 1 010	Kasi Kelembagaan	Diklat Khusus Provisi Advokat KORPRI ( PKPA KORPRI )
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ( PMD )	52	Ir. ENING ROSMIATI 19651001 199403 2 002	Pengadministrasian Umum	Pelatihan bagi Pelatih Pembina Teknis Pemerintahan Desa ( TOT PTPD )
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	53	REZA ELDO EMARGI, ST 1989314 201502 1 004	Pengendali Dampak Lingkngan	Diklat Dasar-Dasar Amdal
		54	DESSY HARYATY.D, SE 19760304 200901 2 004	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Diklat Manajemen Pembangunan bagi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi
		55	REZA ELDO EMARGI, ST 1989314 201502 1 004	Pengendali Dampak Lingkngan	Diklat Peningkatan Kapasitas Penguatan institusi Daerah dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengendalian Bidang Sumber Daya Alam
		56	REZA ELDO EMARGI, ST 1989314 201502 1 004	Pengendali Dampak Lingkngan	Diklat Peningkatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengendalian
		57	ROSMINI, AMKL 19771210 200701 2 019	Staf. Pelaksana	Diklat Manajemen Pembangunan bagi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi
		58	REZA ELDO EMARGI, ST 1989314 201502 1 004	Pengendali Dampak Lingkngan	Diklat Jabatan Fngsional Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan
		59	M. SUHERMAN, Amd 19800330 201001 1 011	Staf. Pelaksana	Diklat Teknis Inti Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota se-Provinsi Jambi
		60	NURMANI PAKPAHAN, A.Md 19641231 198710 2 011	Kasi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan	Pelatihan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ( FSVA)
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	61	RISKY ARDIANSYAH, SE 19860907 201001 1 011	Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama Angkatan IV

	PINTU				
I3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	62	Drs. ISWARDI 19660404 199303 I 008	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
		63	M. HENDRI 19830312 200901 I 022	Pelaksana Pranata Pemadam Kebakaran	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
I4	DINAS TENAGA KERJA	64	HAJRAL, SE 19730108 199403 I 003	Pelaksana Pengadministrasi Umum	Diklat Dasar Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
		65	HENNY FADILLAH, S.AP 19760504 200801 2 006	Pelaksana Pengadministrasi Umum	Diklat Dasar Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
I5	DINAS KESEHATAN	66	dr. RAFIKA ARTISYAH 19841102 201101 2 004	Kepala Puskesmas Sungai Saren	Pelatihan Keluarga Sehat
		67	M. REZA PAHLEVI, S.KeP 19880709 201001 I 002	Staf Puskesmas Sungai Saren	Pelatihan Keluarga Sehat
		68	EKO HERRY SETYAWAN,S.Kep 19850216 201001 I 010	Staf Puskesmas Sungai Saren	Pelatihan Keluarga Sehat
		69	IKA ILYANA, AM.KEB	Staf Puskesmas Sungai Saren	Pelatihan Keluarga Sehat
		70	DANI ANDIKA Am, Kep 19810113 200604 2 011	Staf Puskesmas Tungkal V	Pelatihan Keluarga Sehat
		71	FITRI SAPTA DEWI, Am. Kep 19880810201705 2 008	Staf Puskesmas Tungkal V	Pelatihan Keluarga Sehat
		72	dr. ERNAWATI KARO- KORO 19790205201410 2 001	Staf Puskesmas Tungkal V	Pelatihan Keluarga Sehat
		73	SITI MARIAM, Am.Kep 19780414 200604 2 013	Staf Puskesmas Tungkal V	Pelatihan Keluarga Sehat
		74	RATNA SARI, Am. Kep 19920722201502 2 001	Staf Puskesmas Tungkal V	Pelatihan Keluarga Sehat
		75	FITRI SAPTA DEWI, Am. Kep 19880810201705 2 008	Staf Puskesmas Tungkal V	Pelatihan Teknik Kebidanan Angkatan II
		76	MAMNUAH,AM.Keb 19850522 200903 2 012	Staf Puskesmas Tungkal I	Pelatihan Pengelolaan Kimuniasi Perubahan Prilaku ( KPP )
		77	TRI LESTARI, Am.Kep 19810113 200604 2 011	Staf Puskesmas Tungkal II	Pelatihan Asesment Petugas Kesehatan Bagi Penggunaan Napsa
78	HOTMA LASMARIA SITUMORANG,Am.Keb 19821115 200501 2 004	Staf Puskesmas Sukarejo	Pelatihan Pengelolaan Kimuniasi Perubahan Prilaku ( KPP )		



		79	SYAMSIRWAN, SKM 19660515 198803 I 003	Ka. Puskesmas Lubuk Kambing	Pelatihan Keluarga Sehat
		80	WINDA FITRIANI, A.Md.Keb 19930208 201502 2 001	Staf Puskesmas Lubuk Kambing	Pelatihan Keluarga Sehat
		81	dr. IMMANUEL S. 1984I220 201101 I 005	Staf Puskesmas Lubuk Kambing	Pelatihan Keluarga Sehat
		82	MUHAMMAD DEDY KARDIANTO, AMK 19800323 200604 I 002	Staf Puskesmas Lubuk Kambing	Pelatihan Keluarga Sehat
16	CAMAT BATANG ASAM	83	DIAN ISMAIL PARIPURNA, S.Sos, 19730505 199602 I 001	CAMAT BATANG ASAM	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat
17	CAMAT SEBERANG KOTA	84	WAHYUDI, S.Sos, 19650107 199403 I 002	CAMAT SEBERANG KOTA	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat
18	CAMAT BETARA	85	TONI ERMAWAN PUTRA,S.STP, M.Si, 19770807 199612 I 001	CAMAT BETARA	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat
		86	ATH. THARIQ,S.STP 1994I211 201609 I 001	Pelaksana Pengadministrasian Umum	Diklat Revolusi Mental

Dengan demikian, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan formal 636 orang mencapai target yang ditetapkan yaitu 15%, namun secara akumulasi pertahun masih belum dapat dihitung dari seluruh kebutuhan PNS, hal ini disebabkan karena:

1. Kebutuhan peningkatan kompetensi PNS melalui kegiatan Diklat Formal belum dapat terakomodir secara maksimal.
2. Belum terintegrasinya penyelenggaraan kegiatan Diklat Formal yang diselenggarakan mandiri baik melalui metode penyelenggaraan maupun pengiriman peserta oleh perangkat daerah lingkup daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar 2,5 % karena ada peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Formal sebanyak 86 orang.

**Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang Akuntabel dan Produktif.**

**SASARAN STRATEGIS II**

**Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur dan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat.**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan Organisasi, keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi.

**Tabel 3.8**  
**Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2**

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>A.</b>	<b>Sasaran I : Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur dan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat.</b>				
1.	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	%	79	77,7	101
2.	Persentase Data ASN yang di Mutakhirkan	%	100	100	100
3.	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	90	90	100
4.	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan	%	90	90	100

#### **I. Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi**

Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian suatu kompetensi Aparatur Sipil Negara pada suatu jenis pada jenjang tertentu. Tujuan diselenggarakannya uji kompetensi yaitu pertama untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara berupa pengetahuan, Keterampilan, Sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.

Kedua yaitu memberikan pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian dalam rangka pembinaan dan Pengembangan karier Aparatur Sipil Negara, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan kelancaran penyelenggaraan tugas pembangunan, sosok Aparatur Sipil

Negara yang profesional sangat dibutuhkan. Profesionalitas seorang Aparatur Sipil Negara yang ditampilkan melalui kemampuan melayani masyarakat dengan cepat dan berkualitas akan menentukan hasil dari pembangunan yang dilaksanakan sehingga profesionalitas menjadi salah satu pertimbangan penting dalam rangkaian proses evaluasi dan penempatan Aparatur Sipil Negara. Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme ASN dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga uji kompetensi dijadikan sebagai salah satu Indikator kinerja. Jumlah aparatur yang telah mengikuti uji kompetensi pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9  
Analisis Capaian IKU

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2017	Realisasi Capaian s/d Tahun 2018		Jumlah
			Target	Realisasi	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	❖ Jumlah pejabat yang telah mengikuti Uji Kompetensi	71 Orang	4 Orang	25 Orang	96 Orang
	❖ Jumlah fungsional umum dan fungsional tertentu yang telah mengikuti Uji Kompetensi	2846 Orang	261 Orang	219 Orang	3086Orang
<b>TOTAL</b>					<b>3282 Orang</b>
<b>Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi (%)</b>					<b>77,7</b>

Sampai dengan tahun 2018 total apartur yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 3086 orang atau bertambah 240 orang dibanding tahun sebelumnya dan jumlah realisasi uji kompetensi terbesar berada pada fungsional umum dan fungsional tertentu yang didominasi oleh fungsional tertentu yaitu tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, sedangkan jumlah pegawai Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai unsur pembagi sebanyak 3996 orang, sehingga persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi ditargetkan sebesar 79% dan realisasinya pada tahun 2018 sebesar 77,7%. Dengan demikian pada tahun 2018 target capaian kinerja yang belum dapat tercapai sebesar 2,3%,akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rasio capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 108%. Hal ini disebabkan karena:

- a. Peningkatan kompetensi aparatur belum dapat terakomodir secara maksimal,

- b. Belum terintegrasinya penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi fungsional umum yang diselenggarakan mandiri baik melalui metode penyelenggaraan maupun pengiriman peserta uji kompetensi oleh perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**Tabel 3.10**  
**Apartur yang mengikuti Uji Kompetensi**

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Jumlah fungsional umum dan fungsional tertentu yang telah mengikuti Uji Kompetensi</b>	
1.	Fungsional Polisi Pamong Praja	17 Orang
2.	Fungsional Umum	124 Orang
3.	Fungsional Kesehatan	74 Orang
4.	Fungsional Guru	-
<b>B.</b>	<b>Jumlah pejabat yang telah mengikuti Uji Kompetensi</b>	
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	24 Orang
3.	Eselon IV	-
<b>Total</b>		<b>240 Orang</b>

## 2. Persentase Data ASN yang di Mutakhirkan

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun konsep.

Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai obyek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemerosesan data.

Dengan demikian, Output dalam pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk Buku seperti Data Urut Kepangkatan (DUK), Data Profile Aparatur Sipil Negara, Data Struktur Organisasi dan Data Bezzeting Formasi yang merupakan bagian dari informasi kondisi data Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018.

Tabel 3.II  
Analisis Capaian IKU

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2017	Realisasi Capaian s/d Tahun 2018	
			Target	Realisasi
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Data ASN yang dimutakhirkan	100%	100%	100%

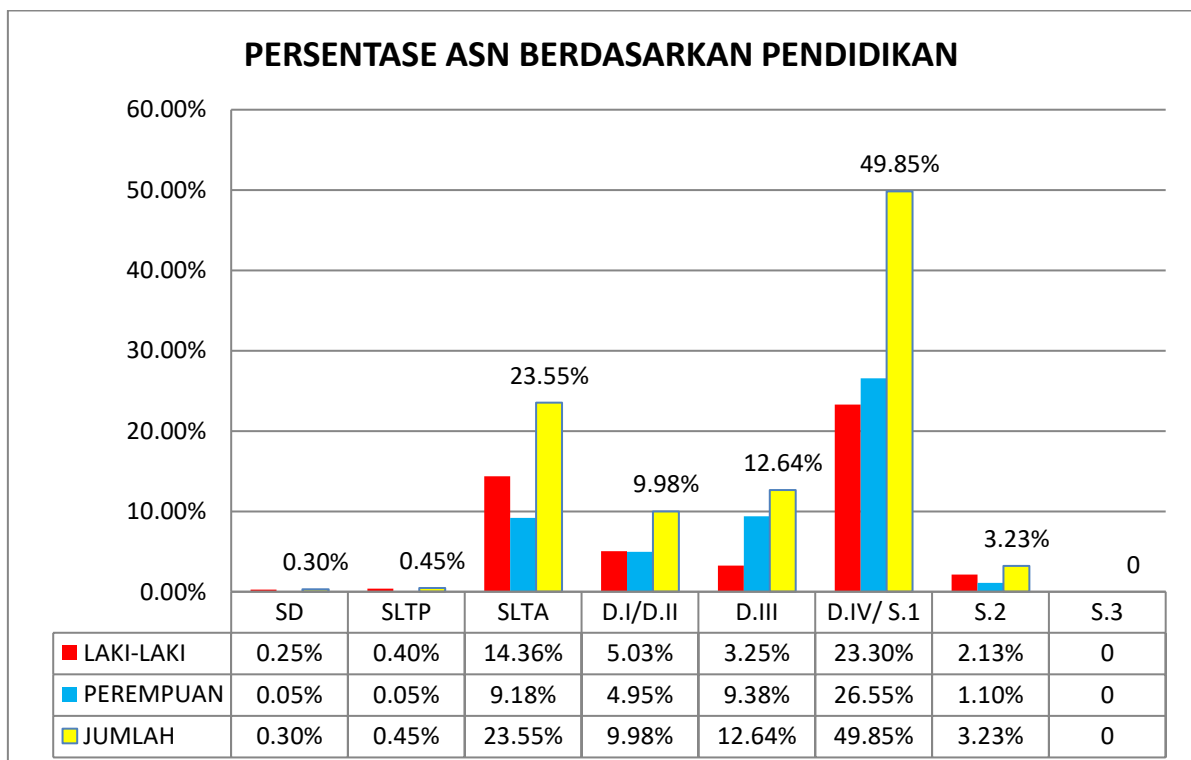
Tahapan dan capaian kegiatan yang dilaksanakan adalah:

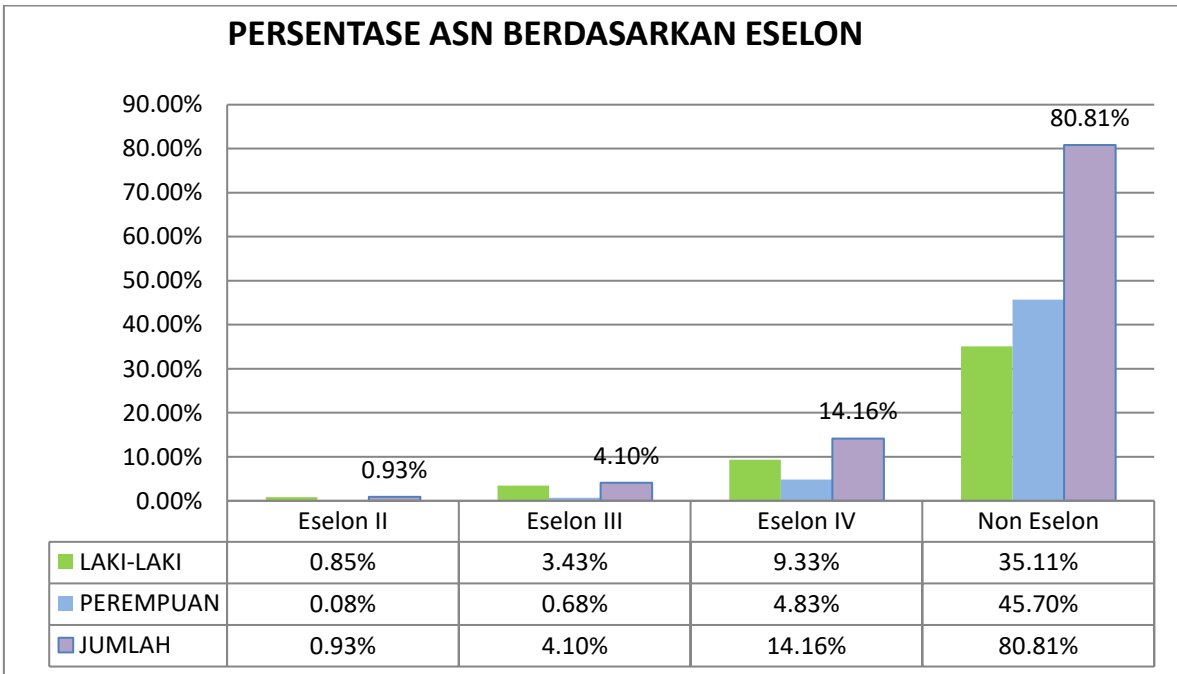
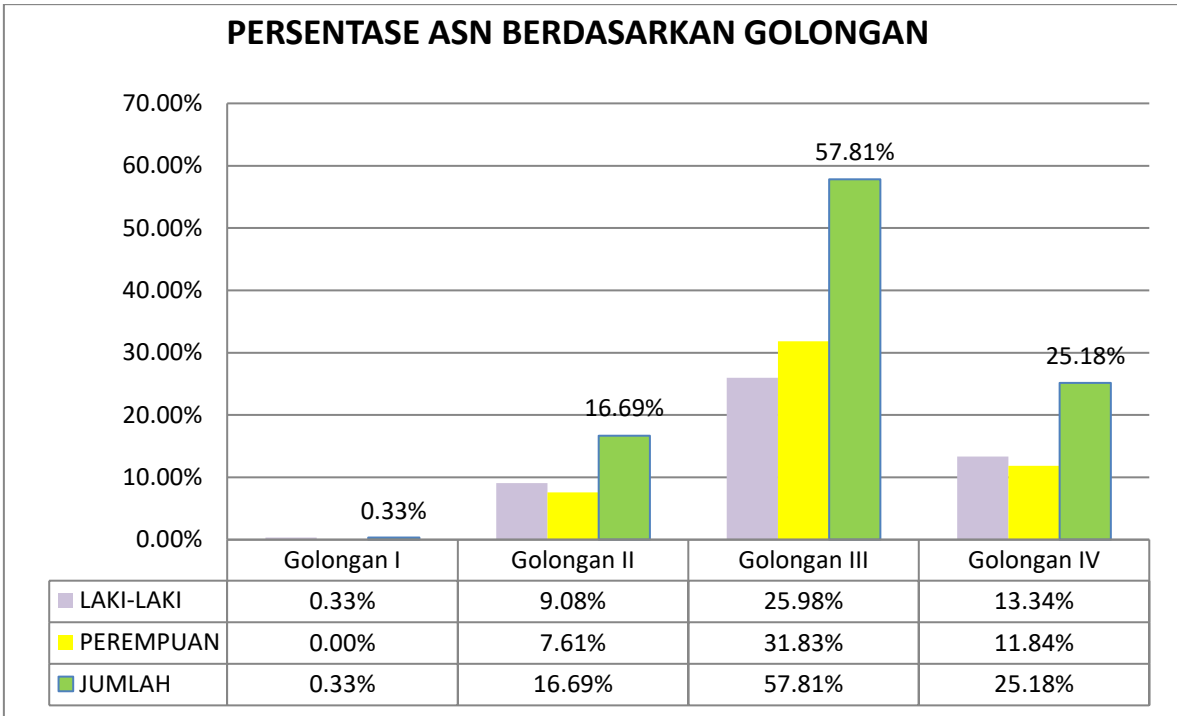
1. Dilaksanakan penyusunan dokumen updating sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) meliputi nama, gelar, NIP, jenis kelamin, golongan terakhir, jabatan, eselon, unit kerja, tingkat pendidikan dan data lainnya
2. Dilaksanakan updating data aparatur yang meliputi aparatur yang naik pangkat, aparatur yang mutasi dalam dan luar daerah, aparatur yang pensiun, aparatur yang melakukan penyesuaian ijazah, aparatur yang mengundurkan diri dan aparatur yang masih terdapat kesalahan data.

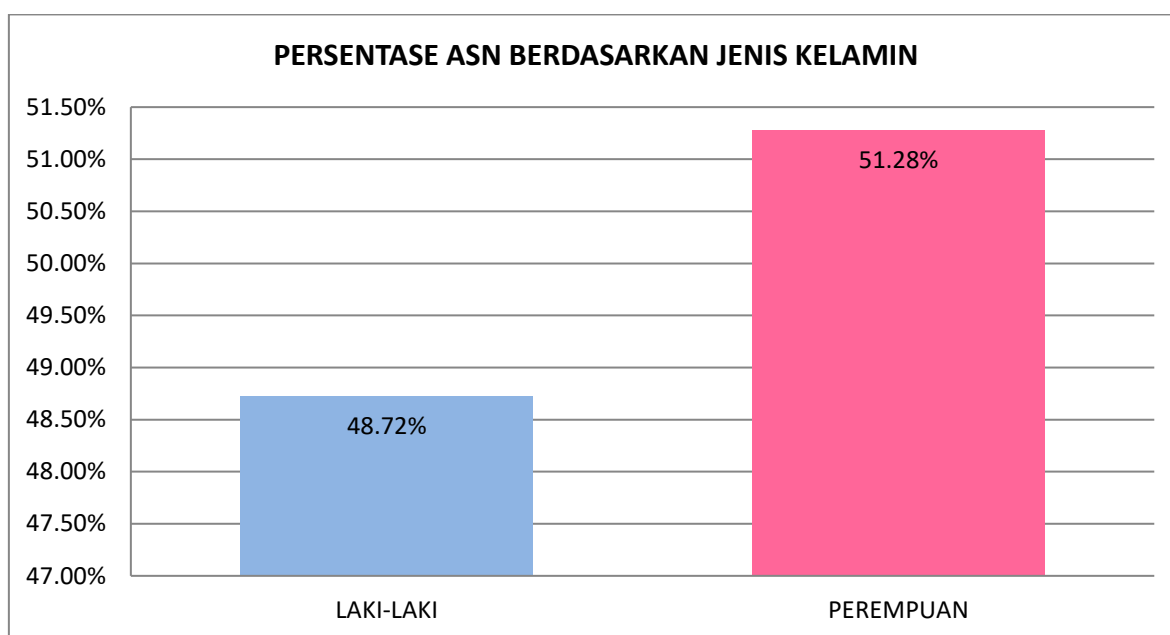
Tabel 3.I2  
REKAPITULASI DATA APARATUR SIPIL NEGARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN DAN ESELON  
TAHUN 2018

NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A.	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan			
1.	Sekolah Dasar	12	10	2
2.	SLTP	18	16	2
3.	SLTA	941	574	367
4.	D.I/D.II	399	201	198
5.	D.III	505	130	375
6.	D.IV/ S.I	1992	931	1061

7.	S.2	129	85	44
8.	S.3	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3996</b>	<b>1947</b>	<b>2049</b>
<b>B. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan</b>				
1.	Golongan I	13	13	0
2.	Golongan II	667	363	304
3.	Golongan III	2310	1038	1272
4.	Golongan IV	1006	533	473
<b>TOTAL</b>		<b>3996</b>	<b>1947</b>	<b>2049</b>
<b>C. Jumlah ASN Berdasarkan Eselon</b>				
1.	Eselon II	37	34	3
2.	Eselon III	164	137	27
3.	Eselon IV	566	373	193
4.	Non Eselon	3229	1403	1826
<b>TOTAL</b>		<b>3996</b>	<b>1947</b>	<b>2049</b>







### 3. Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Pelayanan Administrasi Kepegawaian diukur berdasarkan jumlah berkas pensiun, berkas kenaikan pangkat, berkas Karis/ Karsu/ Karpeg, Berkas Cuti, Berkas Satya lencana, Berkas Izin Cerai, Tugas Belajar dan izin belajar yang di Proses yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 3.I3**  
Capaian IKU BKPSDM Kab. Tanjab Barat

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2018		Capaian %
			Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Berkas Pensiun	147 Orang	100 Orang	152 Orang	152
2.	Berkas Kenaikan Pangkat	600 Orang	600 Orang	699 Orang	116,5
3.	Berkas Karis	333 Orang	200 Orang	149 Orang	74,5
4.	Berkas Karsu	279 Orang	200 Orang	164 Orang	82
5.	Berkas Karpeg	219 Orang	200 Orang	123 Orang	61,5
6.	Berkas Cuti Haji/ Umroh	124 Orang	350 Orang	99 Orang	28,29
7.	Berkas Satya Lencana	399 Orang	100 Orang	508 Orang	508
8.	Berkas Izin Cerai	18 Kasus	12 Orang	11 Orang	91,67
9.	Berkas Tugas Belajar	27 Orang	10 Orang	10 Orang	100
10.	Berkas Izin Belajar	25 Orang	10 Orang	10 Orang	100
<b>TOTAL</b>			<b>1782</b>	<b>1925</b>	<b>131,45</b>



Pada tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian pelayanan administrasi kepegawaian pada tahun 2019 sebesar 131,45%, akan tetapi jika dihitung target realisasi per-indikator masih terdapat beberapa capaian yang masih rendah atau belum tercapai hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Kurangnya pengajuan berkas administrasi di beberapa indikator yang harus diproses,
2. Penerbitan berkas administrasi di beberapa indikator belum dapat terselesaikan dikarenakan terdapat beberapa proses penerbitan administrasi yang merupakan wewenang Kanreg VII BKN dan BKN pusat, maka banyak usul penerbitan tidak pada periode tahun usul.

### 3. Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai yang terselesaikan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dengan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka Badan kepegawaian Daerah sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang baik melalui penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin.

**Tabel 3.14**  
**Analisis Capaian IKU**

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2018		Jumlah
			TARGET	REALISASI	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan	19 Kasus	12 Kasus	11 Kasus	30 Kasus
<b>Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai yang terselesaikan (%)</b>					<b>90</b>

Dengan demikian capaian indikator persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai yang terselesaikan pada tahun 2018 sebesar 91,67%. Adapun kasus pelanggaran disiplin yang

terselesaikan pada tahun ini didominasi oleh kasus perceraian yang mana pada tahun 2018 kasus perceraian di Kab. Tanjung Jabung Barat terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2017 sedangkan kasus yang bersifat indisipliner pada tahun ini cukup kecil, selain itu masih terdapat kasus indisipliner yang masih dalam tingkat proses penjatuhan disiplin sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang Akuntabel dan Produktif.

SASARAN  
STRATEGIS III

Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan,  
Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota  
KORPRI

Untuk sasaran 3 terdapat 1 indikator pendukung sebagai berikut:

Tabel 3.15  
Capaian IKU pada sasaran strategis III

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
A.	Sasaran III : Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota KORPRI				
I.	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI	%	100	100	100

Uraian mengenai Indikator pendukung tersebut yaitu:

#### I. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI

Dalam penyelenggaraan peringatan HUT KORPRI tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada anak anggota KORPRI berprestasi Kab. Tanjung Jabung Barat untuk PNS Gol I dan Gol II yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan kesejahteraan bagi anggota KORPRI, dimana dalam pelaksanaan kegiatan HUT KORPRI tahun 2018 dapat dilaksanakan/direalisasikan dan berjalan dengan lancar.

3.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018 (%)	unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Peningkatan SDM aparatur yang berkualitas dan Berkomp etensi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural (%)	48	6,558,540,228	26.9	-	27.9	172,272,000									1	202,475,850	27.9	202,475,850	58.2	3.1	BKPSDM
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	24.5	5,550,374,000	13.4	94145500.0	15	204,690,850									2.6	83,175,000	15.9	177,320,500	65.1	3.2	BKPSDM

		Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional bagi Aparatur dan Fungsional Daerah Pola Kontribusi	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional (Orang)	40	742,513,854	18														BKPSDM
		Diklat Prajabatan CPNS Gol II dan III	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan (Orang)	854	6,809,199,000	160														BKPSDM
																				BKPSDM
																				BKPSDM
																				BKPSDM
																				BKPSDM
																				BKPSDM
																				BKPSDM
																				BKPSDM
																				BKPSDM
2	<b>Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi serta Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan (%)</b>	90	707,164,880	0														BKPSDM
			<b>Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi (%)</b>	85	7,339,123,509	71.7														BKPSDM
			<b>Persentase Data ASN yang di Mutakhirkan (%)</b>	100	1,112,659,076	0														BKPSDM





	Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja (Orang)	600	752,000,000										BKPSDM
	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Kab. Tanjung Barat	Tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Orang)	250	138,000,000										BKPSDM
	Pengadaan CPNS dan PPPK	Jumlah Formasi yang diusulkan (Orang)	1400	3,600,000,000										BKPSDM
3	Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota KORPRI	<b>Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI (%)</b>	100	433,997,717	100	122,484,000	100	56,970,000						<b>BKPSDM</b>
		<b>Persentase Bantuan Hukum yang difasilitasi (%)</b>	100	539,307,976	100	195,192,000								<b>BKPSDM</b>

# LAKIP

		Peringatan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia	Terselenggaranya kegiatan HUT KORPRS dan Meningkatnya kesejahteraan Anggota KORPRI Kab. Tanjab Barat (%)	100	368,047,821	0	122,484,000	100	61,900,000							100	49,680,000	100	49,680,000	100	172,164,000	100	46.8	BKPSDM
--	--	---	--	-----	-------------	---	-------------	-----	------------	--	--	--	--	--	--	-----	------------	-----	------------	-----	-------------	-----	------	--------



3.3. PERBANDINGAN DATA KINERJA ANTARA REALISASI

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Peningkatan SDM aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural (%)	26,9	48			27,9	172.272.000	40,9	1.585.035.600	44	1.594.079.880	48	1.603.576.374										BKPSDM
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	11,6	24,5	12,4	261.015.350	13,7	873.737.800	15	205.620.850	17	130.000.000	19,2	1.980.000.000	13,0	94.145.500	13,4	105%	36%	98%	106%	40%		BKPSDM
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional bagi Aparatur dan Fungsional Daerah Pola Kontribusi	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional (Orang)	51	40		742.513.854		172.272.000	10	180.885.600	10	189.929.880	10	199.426.374										BKPSDM
		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV (Orang)	40	90		1.812.450.000			30	604.150.000	30	604.150.000	30	604.150.000										BKPSDM
		Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat PIMPEMDAGRI (Orang)		120		2.400.000.000			40	800.000.000	40	800.000.000	40	800.000.000										BKPSDM



awain yang akurat	Persentase Data ASN yang dimutakhirkan (%)	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	Kepangkatan Jumlah PNS yang naik pangkat (Orang)	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan (Kasus)	Penilaian Kinerja Aparatur Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja (Orang)	Pengembangan Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Buku/Orang)	Penyusunan Pola Karir ASN Jumlah Pola Karir yang tersusun sesuai dengan kompetensi (Jabatan)	Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tk. I dan II Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tk. I dan II (Orang)	BKPSDM	BKPSDM	BKPSDM	BKPSDM	BKPSDM	BKPSDM	BKPSDM
	1,112,659,076	1,797,090,28													
100	90	90	750	33	600	25	12540	240							
90				10		20									
91,285,000				121,525,000		49,124,500									
88,910,000				197,429,630		85,750,000									
90				5		5									
283,300,000				71,000,000		186,000,000									
100				5		150									
152,565,000				74,550,000		186,000,000									
160,193,250				78,277,500		190,000,000									
100				3		150									
168,202,913				82,191,375		190,000,000									
90,759,400				110,866,800		46,888,250									
90				10		20									
76,221,700				188,763,400		95,680,000									
62,100,000				203,313,250		143,129,000									
100				11		356									
22%				286%		77%									
100%				220%		237%									
86%				96%		112%									
100%				180%		640%									
99%				91%		95%									
100%				100%		100%									





3	Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Pengembangan, dan Perlindungan Hukum Anggota Korpri	Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI	Persentase Bantuan Hukum yang difasilitasi (%)	Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPRI (%)	Fasilitasi Konsultasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Korpri dan LKBH Korpri	Jumlah ASN yang mendapatkan Fasilitas Konsultasi Bantuan Hukum bagi anggota Korpri (Kasus)	Peringatan Korps pegawai Republik Indonesia	Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPRI (%)	B K P S D M	B K P S D M	B K P S D M	B K P S D M				
									100	100	100	49,680,000	100	100%	100%	100%
									100	100	100	49,709,000	8	100%	100%	100%
									117,095,000	72,775,000	117,095,000	117,095,000	3	100%	100%	100%
									100	100	100	49,680,000	3	100%	100%	100%
									88,580,363	65,949,896	88,580,363	65,949,896	3	100%	100%	100%
									100	100	100	49,680,000	3	100%	100%	100%
									84,362,250	62,809,425	84,362,250	62,809,425	3	100%	100%	100%
									100	100	100	49,680,000	3	100%	100%	100%
									80,345,000	59,818,500	80,345,000	59,818,500	3	100%	100%	100%
									100	100	100	49,680,000	3	100%	100%	100%
									100	100	100	49,680,000	3	100%	100%	100%
									80,345,000	49,725,000	80,345,000	49,725,000	3	100%	100%	100%
									539,307,976	433,997,717	450,727,613	368,047,821	15	100		

3.4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA MENGAJU PADA TARGET PROGRAM RPJMD

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan (2015)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RPKD Kabupaten/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kabupaten/Kota Melalui Pelaksanaan RPKD Tahun Ke-						Rasio / Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/Kota Hasil Pelaksanaan RPKD Kabupaten/Kota Tahun Ke- (%)						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	25	26		
						K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		K
1	<b>Peningkatan SDM aparatur yang berkualitas dan Berkompotensi</b>	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Struktural (%)  Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	26.9  11.6	48  24.5	6.558.540,228  5.550.374,000	27.9  12.4	40.9  13.7	172.272,000  205.620,850	40.9  17	1.585,035,600  130,000,000	44  19.2	1.594,079,880  120,000,000	48  24.5	1.603,576,374  1.980,000,000	11.6  11.6	27.9  15.9	202.475,850  83,175,000	118  40	100  106	98  95	36  94	93  100	27.9  15.9	202.475,850  177.320,500	58.2  65.1	3.1  3.2
2	<b>Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi serta Data dan InformasiKepegawaian yang akurat</b>	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi (%)  Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan (%)  Persentase Data ASN yang dimutakhirkan (%)  Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	69.99  90  90  90	85  90  100  90	7.339,123,509  707,164,880  1.112,659,076  1.797,090,280	73  90  90	76  90	967,400,000  197,429,630  88,910,000  202,293,250	82  90  100  90	74,550,000  78,277,500  152,565,000  374,805,413	85  90  100  90	1.673,761,213  78,277,500  160,193,250  393,545,683	85  90  100  90	999,449,273  82,191,375  168,202,913  413,222,967	69.97  90  90  90	652,449,960  110,866,800  90,759,400  236,688,000	71.72  90  70  90	917,909,640  188,763,400  76,221,700  90	77.7  90  100  90	94  100  78  117	96  91  100  100	140  100  99  90	96  100  100  90	2.020,305,950  559,353,450  229,081,100  236,688,000	91.4  100  100  100	27.5  79.1  20.6  13





Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja yang mengacu pada target program RPJMD diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian kinerja terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya maupun dari capaian yang di targetkan pada tahun ini, adapun indikator tersebut antara lain:
  - 1) Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural dengan target awal perencanaan sebesar 26,9% sedangkan target kinerja pada tahun 2018 sebesar 27,9% dan realisasi pada tahun 2018 sebesar 27,9% dengan rasio tingkat capaian target sebesar 100% dan rasio capaian akhir 58,2%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih dibutuhkan capaian kinerja sebesar 41,8%.
  - 2) Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal terjadi peningkatan capaian kinerja, dimana capaian realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 13,4% sedangkan target kinerja pada tahun 2018 sebesar 15% dan realisasi pada tahun 2018 sebesar 15,9% dengan rasio tingkat capaian target sebesar 106% dan rasio capaian akhir 65,1%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih dibutuhkan capaian kinerja sebesar 34,9%.
- b) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari 4 indikator dimana terdapat 3 indikator memenuhi capaian target kinerja dan terdapat 1 indikator yang belum memenuhi target kinerja, adapun indikator tersebut antara lain:
  - 1) Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi dengan capaian realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 71,7% sedangkan target kinerja pada tahun 2018 sebesar 79% dan realisasi pada tahun 2018 sebesar 77,7% dengan rasio tingkat capaian target sebesar 98% dan rasio capaian akhir 91,4%, Dengan demikian pada tahun 2018 target capaian kinerja yang belum dapat tercapai sebesar 2,3%. jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih dibutuhkan capaian kinerja sebesar 7,3%.
  - 2) Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan, dimana capaian realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 90% sedangkan target kinerja pada tahun 2018 sebesar 90% dan realisasi pada tahun 2018 sebesar 90% dengan rasio tingkat capaian target sebesar 100% dan rasio capaian akhir 100%.
  - 3) Persentase Data ASN yang dimutahirkan, dimana capaian realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 90% sedangkan target kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% dan realisasi pada tahun 2018 sebesar 100% dengan rasio tingkat capaian target sebesar 100% dan rasio capaian akhir 100%.

- 4) Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan target awal perencanaan sebesar 90% sedangkan target kinerja pada tahun 2018 sebesar 90% dan realisasi pada tahun 2018 sebesar 90% dengan rasio tingkat capaian target sebesar 100% dan rasio capaian akhir 90%.
- c) Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI
  - 1) Tingkat Keberhasilan HUT KORPRI, dimana capaian realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% sedangkan target kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% dan realisasi pada tahun 2018 sebesar 100% dengan rasio tingkat capaian target sebesar 100% dan rasio capaian akhir 100%.

### 3.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh BKPSDM memberikan data nilai output per-unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan selain permasalahan dalam hal pembiayaan, permasalahan sarana dan prasarana secara kualitas juga menjadi kendala. Kurangnya perangkat komputer beserta printer dan jaringan internet yang stabil merupakan permasalahan utama yang mewarnai perjalanan BKPSDM tahun 2018.

### 3.6. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, pagu BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2018 sebesar Rp. 8.314.693.050 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.433.363.000 dan Belanja Langsung Rp. 3.881.330.050, sedangkan realisasi sebesar Rp. 6.773.007.019 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.430.566.298 dan Belanja Langsung Rp. 3.342.440.721.

Data anggaran dan realisasi APBD BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat untuk periode 31 Desember tahun anggaran 2018 adalah tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.16  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA DAERAH	8,314,693,050	6,773,007,019	1,541,686,031	81.46
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,433,363,000	3,430,566,298	1,002,796,702	77.38
-	BELANJA PEGAWAI	4,433,363,000	3,430,566,298	1,002,796,702	77.38
3	BELANJA LANGSUNG	3,881,330,050	3,342,440,721	538,889,329	86.12
-	BELANJA PEGAWAI	1,034,605,000	968,305,000	66,300,000	93.59
-	BELANJA BARANG DAN JASA	2,637,894,850	2,170,245,721	467,649,129	82.27
-	BELANJA MODAL	208,830,200	203,890,000	4,940,200	97.63
4	SURPLUS/ (DEFISIT)	(8,314,693,050)	(6,773,007,019)	(1,541,686,031)	81.46

Tabel 3.16  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		
		Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.251.763.000	32,25	1.203.356.771	92,05	98
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	411.280.200	10,60	382.488.450	91,41	100
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	28.700.000	0,74	24.850.000	86,59	100
4.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	142.620.750	3,67	125.175.000	87,69	100
5.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.608.103.250	41,43	1.270.729.650	82,26	94,81
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	376.962.850	9,71	286.150.850	73,34	90,51
7.	Peningkatan Motivasi Anggota	61.900.000	1,59	49.680.000	80,26	93,85

	KORPRI					
	Jumlah 2018	3.881.330.050	100	3.342.430.721	86,12	96,70
	Jumlah 2017	3.312.904.300	100	3.099.355.075	93,55	94,02

### 3.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN

Dalam mewujudkan sasaran BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 mengelola 7 program dan 31 kegiatan yaitu:

#### 1. Program dan Kegiatan

- ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 Kegiatan antara lain:
  - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - ✓ Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
  - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman
  - ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  
- ❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 Kegiatan antara lain:
  - ✓ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  
- ❖ Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 Kegiatan antara lain:
  - ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
  
- ❖ Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 Kegiatan antara lain:
  - ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kerja

- ✓ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  
- ❖ Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari I I Kegiatan antara lain:
  - ✓ Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  - ✓ Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
  - ✓ Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
  - ✓ Penilaian Kinerja Aparatur
  - ✓ Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN
  - ✓ Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat
  - ✓ Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
  - ✓ Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian
  - ✓ Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  - ✓ Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kab. Tanjab Barat
  - ✓ Pengadaan CPNS
  
- ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 Kegiatan antara lain:
  - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi
  - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan III
  
- ❖ Program Peningkatan Motivasi Anggota Korpri terdiri dari I Kegiatan antara lain:
  - ✓ Peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia

## 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 10 Kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.251.763.000,- dengan tingkat realisasi keuangan sebesar Rp. 1.203.365.771,- (92,05%) dengan rata-rata realisasi fisik

92,05%. Adapun output yang dihasilkan meliputi penyediaan surat menyurat, listrik, air, alat tulis, dan barang cetakan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Penyediaan jasa surat menyurat anggaran untuk kegiatan ini Rp. 4.332.000,- dengan serapan Rp. 3.132.000,- (72,30%) dan realisasi fisik 90,00%.
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran untuk kegiatan ini Rp. 78.400.000,- dengan serapan Rp. 55.011.171,- (70,17%) dan realisasi fisik 90,00%.
- ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 91.580.000,- dengan serapan Rp. 90.255.000,- (98,55%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp. 36.523.850,- dengan serapan Rp. 35.759.500,- (97,91%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp. 80.181.150,- dengan serapan Rp. 79.410.900,- (99,16%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 40.360.000,- dengan serapan Rp. 38.451.750,- (95,27%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp. 5.851.000,- dengan serapan Rp. 5.705.550,- (97,51%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 6.000.000,- dengan serapan Rp. 6.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman anggaran untuk kegiatan ini Rp. 4.200.000,- dengan serapan Rp. 3.850.000,- (91,67%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah anggaran untuk kegiatan ini Rp. 904.435.000,- dengan serapan Rp. 885.780.900,- (97,94%) dan realisasi fisik 100%.

❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 411.280.200,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 382.488.450,- (91,41%) dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output

yang dihasilkan adalah tersedianya perlengkapan kantor, terpeliharanya gedung kantor dan terpeliharanya kendaraan dinas, Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Pengadaan peralatan gedung kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp. 168.830.200,- dengan serapan Rp. 164.380.000,- (97,36%) dan realisasi fisik 100%
- ✓ Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp. 78.700.000,- dengan serapan Rp. 77.686.000,- (98,71%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional anggaran untuk kegiatan ini Rp. 141.000.000,- dengan serapan Rp. 121.437.450,- (86,13%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp. 22.750.000,- dengan serapan Rp. 18.985.000,- (86,59%) dan realisasi fisik 100%.

❖ Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini secara umum dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapan aparatur sehingga terciptanya aparatur yang disiplin. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 28.700.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 24.850.000,- (86,59%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya anggaran untuk kegiatan ini Rp. 28.700.000,- dengan serapan Rp. 24.850.000,- (86,59%) dan realisasi fisik 100%.

❖ Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar. Dengan anggaran yang dialokasikan Rp. 142.620.750,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 125.175.000,- (87,69%) dan realisasi fisik 100%, Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja anggaran untuk kegiatan ini Rp. 83.770.750,- dengan serapan Rp. 73.825.000,- (88,13%) dan realisasi fisik 100%.

- ✓ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun anggaran untuk kegiatan ini Rp. 58.850.000,- dengan serapan Rp. 51.350.000,- (87,26%) dan realisasi fisik 100%.

❖ Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pada tahun 2018 salah satu program prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat adalah program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari 11 kegiatan dengan output kegiatan antara lain:

- ✓ Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka sebanyak 4 Orang.
- ✓ Terbitnya Karis, Karsu, Karpeg, KP-E, Kartu ASN, dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji sebanyak 1.050 Orang
- ✓ Terlaksananya Pelayanan Konseling dan Perkawinan PNS sebanyak 12 Kasus
- ✓ Terlaksananya Pelayanan Pensiun PNS 100 Orang
- ✓ Terlaksananya Pembinaan Disiplin PNS 44 OPD
- ✓ Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD sebanyak 169 Orang
- ✓ Jumlah PNSD yang diambil Sumpah sebanyak 250 Orang
- ✓ Terciptanya Buku Bezzeting/ Formasi PNS Kab. Tanjab Barat TA. 2018 sebanyak 10 Buku
- ✓ Terciptanya Buku Profile Aparatur PNS Kab. Tanjab Barat TA. 2018 sebanyak 10 Buku
- ✓ Terciptanya Buku DUK PNS Kab. Tanjab Barat TA. 2018 sebanyak 10 Buku
- ✓ Terciptanya Buku Laporan Penetapan Hukuman Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat TA. 2018 sebanyak 10 Buku
- ✓ Terciptanya Buku Struktur OPD Kab. Tanjab Barat TA. 2018 sebanyak 10 Buku
- ✓ Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan SAPK (Perka BKN No. 18 Tahun 2010) selama 12 bulan
- ✓ Terseleksinya Penerimaan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS sebanyak 20 Orang
- ✓ Terlaksananya Pembekalan Pola Pendidikan Calon Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat sebanyak 25 Orang
- ✓ Terlaksananya seleksi calon taruna sekolah tinggi perikanan 43 orang



- ✓ Terlaksananya Pengangkatan, Kenaikan Jabatan, Inpassing, Pembebasan dan Pemberhentian dan Uji Kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional 261 Orang
- ✓ Jumlah PNS yang mengajukan kenaikan pangkat periode April dan Oktober sebanyak 600 Orang
- ✓ Pelaksanaan Pelantikan Pejabat dan Mutasi Pegawai sebanyak 150 Orang
- ✓ Terlaksananya Sosialisasi dan Penyusunan LHKPN Kab. Tanjab Barat sebanyak 304 Orang
- ✓ Terpenuhinya Formasi CPNS yang dibutuhkan sebanyak 250 orang

Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 1.608.103.250,- dengan tingkat realisasi keuangan sebesar Rp. 1.270.729.650,- (82,26%) dan realisasi fisik 94,81%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat anggaran untuk kegiatan ini Rp. 158.812.000,- dengan serapan Rp. 134.588.000,- (84,75%) dan realisasi fisik 93,75%.
- ✓ Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama anggaran untuk kegiatan ini Rp. 139.560.000,- dengan serapan Rp. 107.065.000,- (76,72%) dan realisasi fisik 85,68%.
- ✓ Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 168.286.750,- dengan serapan Rp. 101.927.350,- (60,57%) dan realisasi fisik 80,60%.
- ✓ Penilaian Kinerja Aparatur anggaran untuk kegiatan ini Rp. 171.085.000,- dengan serapan Rp. 143.129.000,- (83,66%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Fasilitasi pengelolaan KARIS/KARSU, KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN anggaran untuk kegiatan ini Rp. 61.750.000,- dengan serapan Rp. 54.050.000,- (87,53%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat anggaran untuk kegiatan ini Rp. 213.258.250,- dengan serapan Rp. 203.313.250,- (95,34%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD anggaran untuk kegiatan ini Rp. 48.725.000,- dengan serapan Rp. 48.050.000,- (98,61%) dan realisasi fisik 100%.

- ✓ Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian anggaran untuk kegiatan ini Rp. 71.000.000,- dengan serapan Rp. 62.100.000,- (87,46%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat anggaran untuk kegiatan ini Rp. 284.666.250,- dengan serapan Rp. 262.272.050,- (92,13%) dan realisasi fisik 95,36%.
- ✓ Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kab. Tanjab Barat anggaran untuk kegiatan ini Rp. 58.810.000,- dengan serapan Rp. 56.410.000,- (95,92%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Pengadaan CPNS anggaran untuk kegiatan ini Rp. 232.150.000,- dengan serapan Rp. 97.825.000,- (42,14%) dan realisasi fisik 87,50%.

❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Kab. Tanjung Jabung Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 376.962.850,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 286.150.850,- (73,74%) dan realisasi fisik 90,51%. Adapun output dari pelaksanaan anggaran tersebut terselenggaranya prajabatan gol II dan III, dengan rincian peserta prajabatan gol II sebanyak 24 orang dan gol III 69 orang dengan total peserta 93 orang dan terlaksananya pengiriman peserta diklat pim II,III dan diklat teknis/fungsional 10 orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi anggaran untuk kegiatan ini Rp. 172.272.000,- dengan serapan Rp. 83.675.000,- (48,57%) dan realisasi fisik 81,01%.
- ✓ Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III anggaran untuk kegiatan ini Rp. 204.690.850,- dengan serapan Rp. 202.475.850,- (98,92%) dan realisasi fisik 100%.

❖ Program Peningkatan Motivasi Anggota Korpri

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan Solidaritas anggota KORPRI Kab. Tanjung Jabung Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang

dialokasikan adalah sebesar Rp. 61.900.000,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 49.680.000,- (80,26%) dan realisasi fisik 93,85%. Adapun output dari pelaksanaan anggaran tersebut terlaksananya HUT Korpri dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Peringatan Korps Pegawai Republik Indonesia anggaran untuk kegiatan ini Rp. 61.900.000,- dengan serapan Rp. 49.680.000,- (80,26%) dan realisasi fisik 93,85%.

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi anggaran untuk kegiatan ini Rp. 172.272.000,- dengan serapan Rp. 83.675.000,- (48,57%)
  - Pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional tidak dapat dilaksanakan dikarenakan biaya pelaksanaan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun lembaga diklat diluar pemerintah berdasarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) tidak mencukupi sebesar biaya yang telah dianggarkan di BKPSDM Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah) sedangkan pengiriman utk mengikuti diklat Pim II tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya kesibukan dari pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang mana pelaksanaan diklat Pim II tersebut dilaksanakan di luar provinsi Jambi.
- Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama anggaran untuk kegiatan ini Rp. 139.560.000,- dengan serapan Rp. 107.065.000,- (76,72%) dan realisasi fisik 85,68%.
  - Kegiatan seleksi pengangkatan pimpinan tinggi pratama mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran, hal ini disebabkan padatnya jadwal komisioner KASN untuk dapat hadir pada saat seleksi terbuka JPT pratama dalam melaksanakan pengawasan sehingga anggaran akomodasi dan transportasi yang dialokasikan untuk komisioner KASN tidak dapat direalisasikan.

- Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 168.286.750,- dengan serapan Rp. 101.927.350,- (60,57%) dan realisasi fisik 80,60%.
  - Kegiatan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran, hal ini disebabkan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional tertentu sering dilimpahkan pada unit kerja yang mengusulkan jabatan fungsional dan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional tertentu dilaksanakan di waktu yang bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural.
- Pengadaan CPNS anggaran untuk kegiatan ini Rp. 232.150.000,- dengan serapan Rp. 97.825.000,- (42,14%) dan realisasi fisik 87,50%.
  - Kegiatan pengadaan CPNS mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran, hal ini disebabkan keterlambatan penerbitan regulasi dari pemerintah tentang juknis pelaksanaan penerimaan CPNS yang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan.

b. Solusi

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang maka dipandang perlu untuk:

- Untuk kebutuhan diklat yang akan diikuti akan didata sesuai kebutuhan masing-masing OPD dan melakukan pola penganggaran untuk diklat teknis dan fungsional sistem per-paket dikarenakan tidak terdapat biaya penyelenggaraan yang baku dari instansi pemerintah maupun lembaga diklat di luar pemerintah..
- Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih baik dengan melakukan koordinasi yang efektif terus menerus dalam penentuan jadwal penyelenggaraan seleksi terbuka JPT pratama.
- Melakukan koordinasi kepada OPD terkait yang mengusulkan jabatan fungsional dan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional tertentu untuk mendelegasikan wewenang kepada kepala BKPSDM dalam melantik pejabat fungsional tersebut serta menjadwalkan antara pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat

fungsional tertentu dan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural dilaksanakan di jadwal yang berbeda. Melakukan koordinasi dengan K/L/D yang membidangi pengadaan CPNS.

BAB IV  
PENUTUP

## A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2018 ini merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 yaitu untuk tahun ketiga, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggung jawabkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 2 (Dua) sasaran dan 1 (Satu) sasaran pendukung yang dinilai berdasarkan 7 indikator kinerja, dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan diperoleh 7 Indikator yang dikategorikan berhasil.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut diatas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang, kita semua berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

## B. Strategi Peningkatan Kinerja

Secara tingkat keseluruhan capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2018 dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan untuk memenuhi sumber daya aparatur yang professional,
2. Melakukan pendataan kebutuhan diklat bagi apartur di lingkup Kab. Tanjung Jabung Barat.
3. Melakukan updating data/peremajaan data di SAPK secara berkala sebagai data dasar untuk melaksanakan pelayanan berbasis e-Government Kepegawaian,

4. Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan administasi kepegawaian mulai dari pengadaan pegawai, penempatan, pengembangan karir, pemberian penghargaan dan hukuman, pemindahan hingga pensiun sehingga dapat dipertanggung jawabkan,
5. Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih baik dengan lembaga pelaksana kediklatan dan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, Meningkatkan motivasi kerja dan komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam renstra.